



# Communication Review

Catatan Tentang Pendidikan Komunikasi  
di Indonesia, Jerman, dan Australia

Kata Pengantar  
Dr. Eko Harry Susanto

Editor  
Setio Budi HH, M.Si.



**ASPIKOM**



Indonesian Association of Communication Studies (IACAS)

**Kata Pengantar :**  
**KOMPLEKSITAS PENDIDIKAN**  
**KOMUNIKASI**

**Dr. Eko Harry Susanto**  
**(Ketua Umum ASPIKOM)**

**Pendahuluan**

Pendidikan Ilmu Komunikasi berkembang pesat sejak reformasi politik di Indonesia. Sebelum tahun 1998, jumlah perguruan tinggi yang mengelola program studi atau jurusan ilmu komunikasi menurut catatan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), kurang lebih 24 institusi penyelenggara (Sendjaja, 2006). Namun setelah terjadi perubahan politik, yang memberikan kebebasan dalam komunikasi, bidang ilmu komunikasi berdasarkan data Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) November Tahun 2009, berjumlah lebih dari 199 di berbagai perguruan tinggi di Indonesia (Kuswarno, 2010)

Pada masa sebelum reformasi, lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap aliran informasi, melakukan pengawasan ketat terhadap individu, kelompok maupun entitas yang bergerak dalam bidang diseminasi pesan yang bersifat terbatas maupun massal. Karena itu, komunikasi seringkali diasumsikan oleh masyarakat pada umumnya, lebih banyak berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan eksistensi kekuasaan negara dalam "penerangan, hubungan masyarakat dan profesi wartawan", yang memiliki ketergantungan terhadap peran pemerintah.

Dengan kata lain, pengelolalan informasi merupakan hegemoni pemerintah yang memiliki kekuatan paksa untuk mengendalikan

lalu lintas informasi. Karena itu, informasi dan komunikasi, menjadi teramat formal, dan seolah - olah hak kelompok elite dalam tubuh kekuasaan negara yang dapat mengontrol khalayak ataupun massa.

Semua informasi dalam manajemen pemerintahan, cenderung menitikberatkan kepada fungsi kontrol dibanding memberikan fleksibilitas untuk mengorganisasikan dan memproduksi pesan yang menghasilkan informasi beragam dan faktual. Masyarakat dan produsen informasi, tidak memiliki kebebasan membangun kreativitas berita dan pesan untuk mempengaruhi khalayak secara demokratis. Kalaupun ada keluwesan dan kreativitas, sayangnya hanya memberikan kebebasan sebagai pemantas, yang tidak menyentuh wilayah sensitif pemberitaan elite dalam tubuh kekuasaan negara.

Pada hakikatnya, blantika komunikasi dan informasi diwarnai oleh komunikasi yang datar dan informasi monoton dalam belunggu jargon kekuasaan negara tentang serasi, selaras seimbang yang diunggulkan, serta ditafsirkan secara integralistik, sesuai dengan kehendak manajemen komunikasi penguasa.

### **Keterbatasan Minat Masyarakat**

Aplikasi ilmu komunikasi yang tidak dapat bergerak bebas, menjadikan bidang ilmu tersebut, tidak bisa dipakai sebagai rujukan masyarakat untuk memperoleh kesuksesan dalam mengembangkan profesionalisme. Akibatnya, muncul kecenderungan, mereka yang belajar di perguruan tinggi dan memilih bidang ilmu komunikasi, adalah kelompok masyarakat, komunitas atau entitas tertentu yang familier terhadap birokrasi pemerintah dengan segala kekuatan politik yang dimiliki dan kekuasaan negara.

Oleh sebab itu, teramat langka perguruan tinggi yang tertarik untuk membuka program studi ilmu komunikasi dan berbagai peminatan yang ada dalam lingkup ilmu komunikasi. Kalaupun dalam perkembangan sebelum reformasi politik, ilmu komunikasi juga dikenal luas, karena memiliki kekuatan aplikatif yang didukung oleh teknologi komunikasi. Namun secara

substantif, belum menghasilkan ataupun mampu memproduksi pesan dan informasi berkualitas sesuai harapan masyarakat. Teknologi komunikasi yang mendukung kecepatan pesan yang didiseminasikan, ternyata tidak berjalan maksimal seiring dengan keterbukaan informasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Sebab pemerintah yang berkuasa beserta ordinat kekuatannya di berbagai institusi, tetap memberlakukan pengendalian informasi yang ketat dan penuh dengan kekhawatiran terhadap terganggunya stabilitas keamanan. Melalui manajemen prasangka dalam komunikasi, dibangun belantara peraturan yang berisi pembatasan langsung maupun tidak langsung, terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Intinya, peraturan - peraturan yang dikeluarkan dalam pengetatan informasi, dipakai sebagai benteng pertahanan yang amat diandalkan oleh manajemen informasi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.

Karena itu, model kreativitas untuk menghasilkan pesan - pesan kepada khalayak, tidak bisa bergerak dinamis. Dengan demikian, kreativitas pesan lebih banyak dikaitkan dengan upaya memberikan dukung terhadap kepentingan bisnis, yang tidak menyinggung aspek sensitif kekuasaan politik pemerintah yang berkuasa. Walaupun begitu, tetapi ternyata produksi pesan pendukung bisnis, tetap saja memperoleh pengawasan ketat dari pemerintah beserta sayap - sayap politiknya di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dalam koridor manajemen aliran pesan bersifat kerucut yang dikendalikan oleh elite yang mendukung satu satu titik pada puncak piramida, maka semua informasi yang beredar, diawasi sejak dari perencanaan sampai eksekusi, untuk disebarkan kepada khalayak. Semua pengawasan, merujuk kepada upaya mempertahankan status quo yang dikehendaki oleh elite dalam pucuk piramida informasi. Karena itu, sekalipun keberadaan informasi didukung oleh teknologi komunikasi, namun tetap menghadapi jerat pengawasan di semua lini aliran informasi. Dengan demikian, teramat sulit mengusung kebebasan komunikasi yang tidak sehaluan dengan kehendak kekuasaan negara.

Secara substansial, keterbelengguan informasi pada akhirnya berdampak terhadap pengembangan ilmu komunikasi yang tidak maksimal. Memang di lingkungan akademisi komunikasi, tidak sesederhana itu dalam menafsirkan manfaat ilmu komunikasi. Mengingat bidang ilmu komunikasi terkait dengan *Communication Studies/Speech Communication, Journalism, New Media, Public Relations, Advertising, Visual Communication, Television, Radio and Film (Broadcasting), Business Communication, Photography, Development Communication*, dan *Management Communication and Media*. (Suprpto, Venus dkk, 2010). Semua yang terkait dengan ilmu komunikasi tersebut, dinilai mampu menghasilkan manfaat positif dalam interaksi antar manusia dengan segala kompleksitas yang dihadapi.

Oleh karena itu, klaim tentang manfaat ilmu komunikasi dalam membangun bangsa dan Negara, lazim kita dengar dalam pesan politik yang disebarakan oleh media massa maupun entitas komunikasi lainnya. Namun tidak bisa dikesampingkan, masyarakat, terlebih lagi komunitas yang memiliki jarak kekuasaan dengan kegiatan pemerintah, cenderung menilai, bahwa ilmu komunikasi berjalan linier dengan peran institusi negara, eksistensi "penerangan" dalam lembaga pemerintah dan tugas kewartawanan yang banyak mengandung resiko.

Kendati demikian, dalam perjalanannya menuju demokrasi, yang diawali oleh reformasi politik, stigmatisasi ilmu komunikasi yang hanya berkaitan dengan control pemerintah tersebut, lambat laun berubah. Aliran pesan yang didukung oleh teknologi komunikasi dan jaringan internet, menjadi sulit untuk dikendalikan oleh kekuatan pemerintah. Mengutip pendapat Hammaday dan Heshmati (2011:2), setiap orang membutuhkan internet untuk berinteraksi dengan orang lain supaya dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Internet merupakan kunci praktis untuk pembangunan manusia dan inovasi.

Dalam kaitannya dengan kondisi di Indonesia, teknologi komunikasi dan internet mendorong munculnya informasi, pesan, berita dan simbol-simbol yang menyuarakan kondisi faktual dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya jauh dari model pengorganisasian informasi manajemen komunikasi pemerintah, yang didistribusikan kepada media massa, badan publik dan entitas - entitas lain yang wajib menjalankan penyebaran informasi. Karena sedemikian banyak berita tentang ketimpangan yang menyangkut alannya pemerintahan, maka terjadi reformasi politik yang mengamanatkan perlunya kebebasan dan transparansi dalam komunikasi. Alhasil, transparansi informasi menjadi salah satu primadona yang diunggulkan dalam pemerintahan pasca reformasi, dan semakin banyak masyarakat yang menekuni ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi.

### **Pertumbuhan Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi**

Bertitik tolak dari reformasi politik, yang memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan gagasan, ilmu komunikasi memperoleh keleluasaan yang faktual. Dalam arti dapat bergerak bebas secara eskalatif untuk beradaptasi dengan tuntutan masyarakat, seputar perlunya demokratisasi komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Sejalan dengan hal tersebut, UUD 1945 pasal 28F, menegaskan bahwa: "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dengan rujukan UUD 45, yang mendukung kebebasan komunikasi, terlepas dari konsisten pelaksanaan, namun tetap memiliki dampak terhadap pertumbuhan bidang ilmu komunikasi yang dinilai mampu memberikan kontribusi dalam keberadaban bernegara. Sejumlah peraturan yang berkaitan langsung dengan dinamika kebebasan komunikasi, antara lain Undang - Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Undang - Undang No. 32/ 2002 tentang Penyiaran. Setelah itu disusul pula dengan munculnya Undang - Undang Nomor Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan – peraturan tersebut, secara esensial menguatkan posisi Ilmu Komunikasi dalam menghadapi perubahan kehidupan bernegara ke arah yang lebih transparan. Sudah barang tentu berbagai macam peraturan lain yang menyangkut terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah faktor yang juga relevan dalam mendukung keleluasaan gerak ilmu komunikasi sirkuler dan interaktif yang peduli terhadap partisipasi masyarakat.

Dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara, harus menyangkut kepentingan umum, dan keterbukaan. Masyarakat dapat berperanserta dan mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Negara.

Sejalan dengan itu, perkembangan peraturan yang terkait dengan otonomi daerah, sejak reformasi politik sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 22/199 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang berpijak kepada demokratisasi, transparansi dan peranserta masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Demikian juga dalam UU No. 2 tahun 2008, tentang Partai Politik, yang mengedepankan kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia, semakin menguatkan semangat keterbukaan. Sudah barang tentu, masih ada peraturan – peraturan lain tentang berbagai hal yang mengedepankan perlunya demokratisasi komunikasi. Intinya, semua peraturan produk pemerintahan reformasi, mendorong tumbuhnya demokratisasi dalam komunikasi, yang memiliki dampak besar terhadap perilaku masyarakat lebih terbuka.

Mencermati merebaknya demokrasi komunikasi, diperlukan sumberdaya yang memiliki keahlian memadai, untuk mengelola kompleksitas produk kebebasan komunikasi dan informasi. Karena itu, berbagai lembaga yang mengelola pendidikan tinggi, berupaya

Peraturan - peraturan tersebut, secara esensial menguatkan posisi Ilmu Komunikasi dalam menghadapi perubahan kehidupan bernegara ke arah yang lebih transparan. Sudah barang tentu berbagai macam peraturan lain yang menyangkut terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah faktor yang juga relevan dalam mendukung keeluasaan gerak ilmu komunikasi sirkuler dan interaktif yang peduli terhadap partisipasi masyarakat.

Dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara, harus menyangkut kepentingan umum, dan keterbukaan. Masyarakat dapat berperanserta dan mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Negara.

Sejalan dengan itu, perkembangan peraturan yang terkait dengan otonomi daerah, sejak reformasi politik sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 22/199 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keeluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang berpijak kepada demokratisasi, transparansi dan peranserta masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Demikian juga dalam UU No. 2 tahun 2008, tentang Partai Politik, yang mengedepankan kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia, semakin menguatkan semangat keterbukaan. Sudah barang tentu, masih ada peraturan - peraturan lain tentang berbagai hal yang mengedepankan perlunya demokratisasi komunikasi. Intinya, semua peraturan produk pemerintahan reformasi, mendorong tumbuhnya demokratisasi dalam komunikasi, yang memiliki dampak besar terhadap perilaku masyarakat lebih terbuka.

Mencermati merebaknya demokrasi komunikasi, diperlukan sumberdaya yang memiliki keahlian memadai, untuk mengelola kompleksitas produk kebebasan komunikasi dan informasi. Karena itu, berbagai lembaga yang mengelola pendidikan tinggi, berupaya

membuka diri untuk mengembangkan ilmu komunikasi, yang dapat mendukung kebebasan komunikasi untuk tujuan kesejahteraan, keadilan dan keberadaban dalam berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan harus demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan dengan standar nasional diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Dengan tidak mengabaikan ketentuan pendirian program studi yang telah ditetapkan pemerintah, program studi ilmu komunikasi jumlahnya terus bertambah dalam waktu yang relatif singkat. Namun dengan semakin banyaknya jumlah prodi Ilmu Komunikasi, maka yang menjadi pertanyaan disini adalah, sejauhmana kompetensi lulusan, dosen, sarana dan prasarana, pengelolaan, tenaga kependidikan mampu diwujudkan sesuai dengan upaya mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu komunikasi dalam masyarakat.

Bagimanapun juga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu komunikasi harus memiliki akuntabilitas sebagai komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan (PP No.66 Tahun 2010). Di sisi lain, kegiatan sistemik dalam memberikan layanan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan perkuliahan sebagaimana dalam konteks penjaminan mutu harus sesuai dengan standar nasional.

Sudah barang tentu dalam konteks reformasi politik, pelaksanaan program kegiatan berupaya untuk melaksanakan keterbukaan untuk mengemukakan informasi yang relevan kepada pengguna lulusan dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna informasi. Sebab, berdasarkan UU No.1 menyediakan informasi secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan mematuhi pula informasi publik yang dikecualikan.

## Pengelolaan Prodi Ilmu Komunikasi

Salah satu faktor yang mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi adalah adanya kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tidak kalah pentingnya, " kurikulum, yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan", sejalan dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional maupun internasional, dengan segala macam problematika yang dihadapi.

Dikemukakan oleh Suprpto, Venus dkk (2010: 1), "sebagai bagian dari komunitas ilmu komunikasi dunia, pengembangan ilmu komunikasi di Indonesia, sepatutnya sejalan dengan tren perkembangan/tuntutan global. Dengan cara begitu maka sumberdaya manusia komunikasi Indonesia, akan mampu berperan dan bersaing dalam tatanan dunia yang semakin integratif, terbuka dan kompetitif".

Pada konteks ini, kurikulum prodi ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, harus tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Karena itu, sudah selayaknya jika program studi dalam bidang Ilmu Komunikasi, yang tersebar di berbagai perguruan tinggi memiliki kurikulum sebagai salah satu pendukung kompetensi, yang dapat mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kompetensi Sarjana Ilmu Komunikasi, diarahkan (1) mempunyai wawasan, pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menganalisis serta memecahkan permasalahan dan fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat. (2) Mempunyai kemampuan bekerja pada era globalisasi dengan dukungan pengetahuan, ketrampilan, teknologi komunikasi, bahasa Indonesia dan bahasa asing. (3) Memiliki sikap dan perilaku sesuai etika profesi dan profesionalisme di bidang komunikasi. (4) Memiliki kemampuan mengimplementasikan ketiga kompetensi di industri komunikasi.

Program Sarjana dalam ilmu komunikasi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a)

## **Pengelolaan Prodi Ilmu Komunikasi**

Salah satu faktor yang mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi adalah adanya kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tidak kalah pentingnya, " kurikulum, yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan", sejalan dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional maupun internasional, dengan segala macam problematika yang dihadapi.

Dikemukakan oleh Suprpto, Venus dkk (2010: 1), "sebagai bagian dari komunitas ilmu komunikasi dunia, pengembangan ilmu komunikasi di Indonesia, sepatutnya sejalan dengan tren perkembangan/tuntutan global. Dengan cara begitu maka sumberdaya manusia komunikasi Indonesia, akan mampu berperan dan bersaing dalam tatanan dunia yang semakin integratif, terbuka dan kompetitif" .

Pada konteks ini, kurikulum prodi ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, harus tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Karena itu, sudah selayaknya jika program studi dalam bidang Ilmu Komunikasi, yang tersebar di berbagai perguruan tinggi memiliki kurikulum sebagai salah satu pendukung kompetensi, yang dapat mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kompetensi Sarjana Ilmu Komunikasi, diarahkan (1) mempunyai wawasan, pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menganalisis serta memecahkan permasalahan dan fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat. (2) Mempunyai kemampuan bekerja pada era globalisasi dengan dukungan pengetahuan, ketrampilan, teknologi komunikasi, bahasa Indonesia dan bahasa asing. (3) Memiliki sikap dan perilaku sesuai etika profesi dan profesionalisme di bidang komunikasi. (4) Memiliki kemampuan mengimplementasikan ketiga kompetensi di industri komunikasi.

Program Sarjana dalam ilmu komunikasi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a)

Penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam rumpun ilmu komunikasi sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah aktual komunikasi. (b) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan komunikasi yang dimiliki untuk kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama, (c) Mampu mengelola sikap dan perilaku positif dalam berkarya di bidang komunikasi dan dalam berkehidupan bersama di masyarakat. (d) Memiliki kemampuan mengimplementasikan ketiga kompetensi di industri komunikasi (Tinambunan dan Tim Aspikom, UPDM, 2009).

Selanjutnya hasil dari UPDM tersebut, dibahas lagi dalam Lokakarya Pengembangan Program Studi Ilmu Komunikasi, Kerjasama antara Direktorat Akademik Depdiknas dengan Aspikom di Surakarta, 2-3 Desember 2009. Dari hasil pembahasan di Surakarta, diskusi - diskusi susulan dilakukan di lingkungan Ditjen Dikti, dan dihasilkan pula Naskah Akademik yang disampaikan ke Ditjen Dikti pada Desember 2010

Dalam perkembangannya, naskah akademik Tim, diupayakan merujuk pula kepada Surat Dirjen Dikti No.1030/D/T/2010 tanggal 26 Agustus 2010. Perihal : Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap, yang ditujukan kepada Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis Wilayah I - XII.

Surat Dirjen Dikti itu selengkapnya berisi sebagai berikut : Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan tetap mempertimbangkan otonomi akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Kolokium Psikologi Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer se-Indonesia (APTIKOM) dan Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap Indonesia (FPALI) telah melakukan kajian terhadap Nomenklatur serta Kompetensi Lulusan untuk keempat bidang ilmu sebagaimana tersebut pada perihal di atas dan menetapkan nama dan jenjang program studi bagi bidang

- bidang ilmu tersebut sebagaimana terlampir.

Dengan telah ditetapkannya nomenklatur sebagaimana pada lampiran surat ini, maka nama - nama program studi untuk keempat bidang ilmu tersebut, yang tercantum dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti 163/DIKTI/Kep/2007 tidak lagi berlaku. Bagi program - program studi yang tidak lagi tercantum dalam lampiran surat ini, agar tetap melanjutkan pendidikannya, sampai mahasiswa - mahasiswa yang saat ini sedang studi dinyatakan lulus.

Sedangkan Lampiran Surat No. 1030/D.T/2010, menetapkan sebagai berikut : Bidang Ilmu Komunikasi, dengan Program Studi : (1) Ilmu Komunikasi, (2) Jurnalistik, (3) Hubungan Masyarakat, (4) Periklanan, (5) Televisi dan Film, (6) Manajemen Komunikasi dan Media. Gelar untuk jenjang S1 adalah S.I.Kom. Sedangkan Jenjang S2 Bidang Ilmu Komunikasi, hanya terdiri dari satu Program Studi Ilmu Komunikasi, dengan gelar M.I.Kom (Magister Ilmu Komunikasi). Demikian pula Jenjang S3 Bidang Ilmu Komunikasi, terdiri dari satu Program Studi Ilmu Komunikasi, dengan gelar Dr (Doktor)

Dengan 6 program studi dalam bidang komunikasi, maka diharapkan penyelenggara prodi ilmu komunikasi, yang semula enam hal tersebut diposisikan sebagai peminatan, dapat dikembangkan menjadi program studi tersendiri. Sedangkan sejumlah perguruan tinggi yang memang sudah memiliki prodi - prodi tersebut, laporan EPSBED dapat menyesuaikan dengan penataan nomenklatur Program Studi Komunikasi yang baru.

Sebab dalam pelaporan EPSBED yang selama ini dilakukan, merujuk kepada SK Dirjen Dikti 163/DIKTI/Kep/2007, yang menetapkan hanya ada satu program studi ilmu komunikasi, sehingga PTN/ PTS yang memiliki prodi lain, misalnya humas, jurnalistik dll tetap memproses dalam EPSBED sebagai Prodi Ilmu Komunikasi. Mengutip pernyataan Kuswarno (2009), SK Dirjen Dikti 163/DIKTI/Kep/2007, semua Prodi (Strata 1, 2 dan 3) bernama Ilmu Komunikasi. Hubungan Masyarakat dan Jurnalistik dikmasukkan dalam Diploma 3 Radio. Sedangkan TV & Film dan Fotografi masuk pada rumpun Seni (program S1).

Selain itu, sesuai dengan UU Sisdiknas tahun 2003, ketentuan

mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi diatur oleh dengan peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, terlepas dari masalah otonomi perguruan tinggi, tetapi gelar akademik bidang ilmu komunikasi diharapkan merujuk kepada Surat No. 1030/D.T/2010.

### **Kompetensi Bidang Ilmu Komunikasi**

Keenam program studi yang telah ditetapkan melalui Surat Dirjen Dikti, No. 1030/D.T/2010, sejatinya harus memiliki kompetensi yang berbeda, antara prodi yang satu dengan yang lain. Karena itu perlu dirumuskan secara spesifik dari masing - masing prodi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Namun kompetensi pada tiap jenjang pendidikan juga harus dinyatakan secara spesifik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Program D3, S1, S2 dan S3. Berdasarkan perumusan Suprpto, Venus dkk (2010: 12), Kompetensi rumpun ilmu komunikasi dalam jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3 adalah sebagai berikut:

1. Program Diploma III dalam rumpun ilmu komunikasi diarahkan pada lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan pekerjaan tertentu dalam kawasan rumpun ilmu komunikasi, khususnya yang bersifat rutin, memiliki kemandirian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban proses dan hasil kerja, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya
2. Program Sarjana dalam ilmu komunikasi, diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi : (a) Penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam rumpun ilmu komunikasi sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah aktual komunikasi. (b) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan komunikasi yang dimiliki untuk kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama, (c) Mampu mengelola sikap dan perilaku positif dalam bersama di masyarakat

3. Program Magister dalam rumpun ilmu komunikasi diarahkan pada hasil lulusan yang (a) Memiliki kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah, serta keterampilan penerapannya. (b) Memiliki kemampuan memecahkan permasalahan dalam kawasan rumpun ilmu komunikasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, (c) Memiliki kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
4. Program Doktor dalam rumpun ilmu komunikasi, diarahkan untuk memiliki kemampuan filsafat dan landasan ilmiah komunikasi, menguasai metodologi penelitian komunikasi dengan segala keragamannya, menguasai paradigma teoritik bidang ilmu sehingga mampu mengembangkan konsep keilmuan komunikasi secara komprehensif, serta mampu mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang komunikasi.

Selain, kompetensi di setiap jenjang, keenam program studi tersebut memiliki kompetensi dan bidang pekerjaan/karir yang berbeda satu sama lain. Untuk menggambarkan perbedaan kompetensi, maka setiap prodi harus memenuhi empat aspek persyaratan bagi kelayakan sebuah program studi, yang meliputi (1) profil lulusan, (2) kompetensi utama dan kompetensi pendukung (3) bahan kajian kurikulum inti, (4) struktur pembelajaran. Penetapan standar kompetensi, juga mengikuti pengelompokan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keterampilan dan Keilmuan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkepribadian dan Bermasyarakat (MBB).

Sebagai ilustrasi, Naskah Akademik Bidang Ilmu Komunikasi (Suprpto, Venus dkk (2010: 12), yang berisi profil lulusan, kompetensi utama dan kompetensi, bahan kajian dan struktur pembelajaran, dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan.

Profil Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi, disiapkan untuk menjadi seorang generalis di bidang komunikasi yang memahami bidang penerapan ilmu komunikasi dalam berbagai konteks pekerjaan. Dengan orientasi yang bersifat umum maka lulusan ini tidak akan mendalami bidang keterampilan komunikasi yang bersifat khusus seperti produksi media elektronik atau mendesain iklan yang dipersyaratkan dalam profesi Komunikasi tertentu. Namun demikian lulusan ini tetap memiliki empat keterampilan dasar komunikasi yang relevan untuk berbagai bidang pekerjaan komunikasi.

Kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi : (a) memiliki kesadaran dan wawasan tentang luas pengaruh ilmu komunikasi dalam konteks kehidupan khususnya sosial, budaya, ekonomi dan politik. (b) Mempunyai kemampuan teoritis dan keterampilan menerapkan ilmu komunikasi untuk bekerja dalam berbagai konteks komunikasi (c) Memiliki keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan memahami efek sosial-komunikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi tersebut (d) Memiliki motivasi, sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi dalam mengembangkan profesionalisme di bidang komunikasi, (e) Memiliki kemampuan mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi sesuai dengan kebutuhan profesi, industri dan sosial

Kompetensi Pendukung, lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi (a) Memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sistem informasi dan audit komunikasi (b) Memiliki keterampilan berbahasa Inggris sebagai medium komunikasi di dunia profesional (c) Memiliki kemampuan human relations, persuasi dan negosiasi dalam menangani berbagai masalah komunikasi

Bahan Kajian Prodi Ilmu Komunikasi, mencakup (1) Wawasan Teori Komunikasi (2) Komunikasi dalam Konteks Antarpribadi (3) Komunikasi Kelompok dan Organisasi, (4) Komunikasi Massa (5) Teknologi Komunikasi dan Informasi (6) Metode Penelitian Komunikasi, (7) Filsafat dan Etika Komunikasi

Struktur Pembelajaran dalam Prodi Ilmu Komunikasi dibagi kedalam empat fase pembelajaran berikut :

1. Tahun Pertama : Membangun kesadaran tentang pengaruh ilmu komunikasi dalam berbagai konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Mahasiswa juga dibekali kemampuan kemampuan memahami proses, fungsi dan strategi komunikasi dalam berbagai konteksnya, serta pembelajaran keterampilan dasar Komunikasi.
2. Tahun Kedua: Memberikan wawasan pengetahuan tentang fungsi dan aplikasi komunikasi dalam berbagai konteksnya serta bekal wawasan teoritis dalam mengidentifikasi, menganalisis dan menerapkan ilmu komunikasi dalam menangani masalah sosial komunikasi.
3. Tahun Ketiga: Membangun kemampuan menerapkan ilmu komunikasi dalam berbagai konteks, saluran dan budaya termasuk relasinya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan isu-isu komunikasi aktual yang membutuhkan analisis teoritis dan etis.
4. Tahun Keempat: memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penelitian dalam tradisi keilmuan komunikasi

Tentu saja untuk program studi lain dalam bidang ilmu komunikasi seperti Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, serta Manajemen Komunikasi dan Media, harus membentuk profil lulusan, kompetensi utama dan kompetensi pendukung, bahan kajian dan struktur pembelajaran yang berbeda, antara satu dengan lainnya. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih yang menghilangkan substansi dari aneka prodi yang telah dibentuk oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan komunikasi.

Melalui karakter spesifik yang dimiliki program studi, diharapkan eksistensi prodi dalam rumpun ilmu komunikasi tetap diminati oleh calon mahasiswa, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Sebab tidak bisa dikesampingkan,

bahwa prodi - prodi yang semula diminati bisa saja ditutup karena sepi peminat. (Susanto, 2011). Karena itu pengelola Prodi dalam rumpun ilmu komunikasi harus terus berupaya, untuk menyesuaikan profil lulusan, kompetensi, pengembangan kajian dan struktur dalam penyelenggaraan perkuliahan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah.

## **Penutup**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu komunikasi yang tumbuh dengan pesat, harus diantisipasi seiring dengan dinamika ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sebab, jika pendirian prodi dalam rumpun ilmu komunikasi hanya mengejar aspek kekinian, dalam arti sebatas melihat popularitas yang dikaitkan dengan eksistensi teknologi komunikasi dan kebebasan informasi, maka keberlanjutan pengelolaan program studi dapat terganggu. Bahkan bukan mustahil, kaerena tidak diangani dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan maupun masyarakat pada umumnya, maka prodi - prodi dalam rumpun ilmu komunikasi, dapat ditinggalkan oleh masyarakat

Karena itu, mengelola prodi, harus disesuaikan dengan kompetensi yang memadai, sehingga kepercayaan publik terhadap lulusan ilmu komunikasi tetap terjaga. Tidak bisa dikesampingkan bahwa semakin banyaknya jumlah prodi ilmu komunikasi, tidak selalu sejalan dengan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan mustahil justru mengabaikan standar kelayakan penyelenggaraan prodi. Akibatnya lulusan yang dihasilkan tidak mencerminkan kualifikasi memadai sebagaimana harapan masyarakat

Sepatutnya, pengelola prodi membangun fondasi yang kuat, agar seluruh sivitas akademika mampu mengembangkan ilmu komunikasi dan menerapkan untuk hal yang bermanfaat. Tetap menjaga standar kompetensi adalah hal mutlak, sehingga eksistensi rumpun ilmu komunikasi tetap dipercaya oleh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat yang mengharapkan peran para lulusan bidang ilmu komunikasi.

## Daftar Pustaka

- Al-Hammadani, Firas H and Almas Heshmati.2011. Determinants of Internet Use in Iraq, *International Journal of Communication* Vol 5, 2011. USC Annenberg School for Communication and Journalism : USCA Press
- Djuarsa, Sendjaja S.2006. Ilmu Komunikasi di Indonesia, makalah disampaikan dalam rangka Pembukaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Juli 2006
- Kuswarno, Engkus. 2009. Perkembangan Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Program Studi Ilmu Komunikasi dan Desain Kompetensi, DIKTI-ASPIKOM, Surakarta 2-3 Desember 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17/2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Suprpto, Hadi, Antar Venus dan Tim Aspiikom . 2010. Naskah Akademik Bidang Ilmu Komunikasi yang disampaikan ke Ditjen Dikti, Desember 2010.
- Surat Dirjen Dikti No.1030/D/T/2010 tanggal 26 Agustus 2010. Perihal : Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap
- Susanto, Eko Harry .2011.Penutupan Program Studi dan Hak Hidup PTS, dalam Surat Kabar Suara Pembaruan, rabu, 13 Juli 2011
- Tinambunan, W.E. dan Tim Aspiikom. 2009. Workshop Kompetensi dan Kurikulum Ilmu Komunikasi di Univ. Prof.Dr. Moestopo Beragama (UPDM-B) : Pematangan Hasil Pembahasan dengan peserta dari PTN dan PTS, dilaksanakan di Pascasarjana Unpad Bandung, Universitas Riau, Univ. Atmajaya Yogyakarta, Univ. Mercubuana, Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Univ. Tarumanagara Jakarta, Univ. Muhammadiyah Malang, Univ. Prof. Dr. Soetomo Surabaya, Jakarta, Mei 2009
- Undang-Undang Dasar 1945. "Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi", Jakarta : Penerbit Visi Media

## Tentang Penulis dan Editor

**Prof. Andre A. Hardjana, MA, Ph.D**, dosen senior Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.

**Bonaventura Satya Bharata, M.Si**, dosen program Ilmu Komunikasi FISIP. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di FISIP - UAJY. Saat ini juga editor Jurnal Komunikasi - ASPIKOM.

**Birgitta Bestari Puspita Jati, S.Sos**, adalah dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pernah mengambil shortcourse di Jerman. Saat ini sedang menempuh studi S-2 di Inggris

**Dina Listiorini, S.Sos, M.Si**, Staf dosen Ilmu Komunikasi UAJY, juga sebagai Ketua Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT - UAJY). Dikenal sebagai aktivis radio komunitas dan studi Gender.

**Dr. Eko Harry Susanto**, Dekan FIKOM, Universitas Tarumanagara. Saat ini sebagai Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi - ASPIKOM.

**Fajar Junaedi, M.Si**, staf dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pernah menjadi Kepala Laboratorium Broadcasting Komunikasi - UMY. Selain itu sebagai Pengurus Pusat ASPIKOM. Menulis dua buku yang baru terbit : *BONEK : Komunitas Suporter Pertama dan Terbesar di Indonesia*, dan *MENYULAP KEKALAHAN: Operasi Militer As dalam Film Hollywood dan Layar TV*.